



Strategi Implementasi Program Roots untuk Mewujudkan Sekolah Aman Bebas dari Perundungan di DKI Jakarta

Kadek Jeny Femila Devi¹, Hamka², Ratri Istanian³

²Politeknik STIA LAN Jakarta Jalan Administrasi II, Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Abstract

Received: 09 Agustus 2024

Revised: 17 Agustus 2024

Accepted: 22 Agustus 2024

Bullying has become a challenge in the world of education because it has negative impacts, including reducing children's opportunities to get quality education. The 2022 National Assessment shows that 36.31% of students have the potential to experience bullying. As an effort to combat bullying, the Ministry of Education and Culture issued Permendikbudristek 46/2023 concerning Prevention and handling of Violence in Educational Unit Environments, as well as implementing the Roots Program as an anti-bullying intervention that focuses on efforts to create a safe climate in schools by actively involving the role of students as agents of change. The Roots Program has been implemented since 2021 and will still be implemented in 2024. This research aims to find out how the Roots Program is implemented using the Van Meter and Van Horn implementation models, as well as the strategy for implementing the Roots Program in DKI Jakarta as one of the provinces with a high number of cases of violence. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of questionnaires, interviews and documentation. The research results show that the implementation of the Roots Program in DKI Jakarta has not been optimal with several obstacles found during the implementation process. To maximize the implementation of the Roots Program in DKI Jakarta, this can be done through adjustments to the strategic plan, active involvement of the Task Force and Violence Prevention Unit, socialization of flexibility in the use of BOS funds, use of Merdeka Mengajar platforms, holding empathy classes, involving parents in cultivating a culture of anti-violence, initiating a movement to dare to report against violence, and building an inclusive classroom atmosphere..

Keywords: *implementation policy, education policy, bullying, roots program*

(*)Corresponding Author: kadekjenyfemiladevi@gmail.com, hamkalaicca@stialan.ac.id, ratriistania@stialan.ac.id

How to Cite: Devi, K. J., Hamka, H., & Istanian, R. (2024). Strategi Implementasi Program Roots untuk Mewujudkan Sekolah Aman Bebas dari Perundungan di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 352-370. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13777189>

PENDAHULUAN

Kekerasan telah diakui sebagai masalah yang serius oleh beberapa lembaga internasional. Pada Mei 2021, Majelis Kesehatan Dunia (WHO) dalam *World Health Assembly ke-74* mengadopsi resolusi baru untuk mengakhiri kekerasan kepada anak-anak (UNICEF, 2021). Resolusi ini menekankan peran pemerintah dan pemangku kepentingan mewujudkan *zero violence* dan menciptakan ruang yang aman bagi anak termasuk pada satuan pendidikan.

Salah satu bentuk kekerasan yang kerap dialami oleh anak adalah perundungan. Perundungan atau *bullying* merupakan kekerasan fisik atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. (Kemendikbudristek,

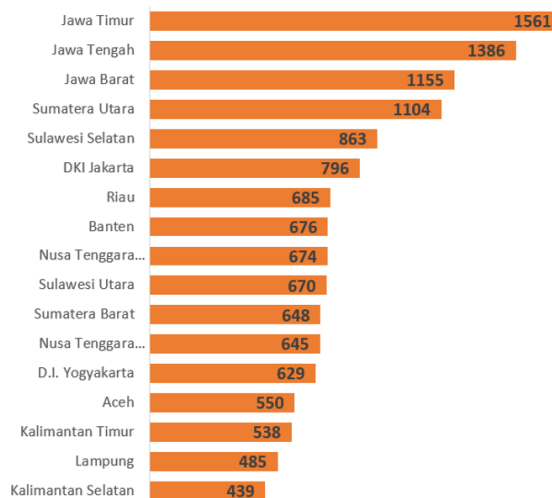
2023a). Perundungan tidak hanya terjadi pada negara berkembang, tetapi negara berkembang berisiko tinggi terjadi kasus perundungan (UNICEF, 2018b). Studi negara barat menyatakan 4-9% remaja terlibat perundungan, dan 9-25% siswa pernah mengalami perundungan (Berger, 2007). Pada negara Amerika Latin, tingkat prevalensi perundungan mencapai 40-50% dimana remaja Peru dan Kolombia menyatakan bahwa mereka kerap menindas orang lain. Di Afrika, 56,4% siswa Afrika Selatan dilaporkan mengalami perundungan (Greeff & Grobler, 2008). Sementara di Asia Tenggara, studi menunjukkan perilaku intimidasi cukup sering terjadi, dan tingkat prevalensi perundungan berada di angka 10% (Rivers & Smith, 1994).

Kondisi yang sama juga dialami Indonesia dimana satuan pendidikan sebagai rumah kedua bagi anak seharusnya dapat membangun lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman (Direktorat Sekolah Dasar, 2021). Namun kenyataan di lapangan menunjukkan 41% pelajar Indonesia mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan (OECD, 2019). Bahkan Asesmen Nasional menunjukkan 36,31% peserta didik berpotensi mengalami perundungan di satuan pendidikan (Kemendikbudristek, 2023b).

Perundungan di satuan pendidikan telah dikaitkan dengan berbagai gangguan psikologis, dan masalah kesehatan psikologis dan emosional (Karatas & Ozturk, 2011). Perundungan dapat menyebabkan depresi, kecemasan, hingga bunuh diri (Takizawa et al., 2014). Perundungan juga memberikan dampak yang buruk pada kesehatan, ekonomi, relasi sosial, dan perilaku illegal lainnya (Wolke et al., 2013). Selain berdampak buruk pada korban, perundungan juga berimplikasi pada kebiasaan buruk para pelaku antara lain sering berkelahi, berbohong, merampok, mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan, serta aktivitas seksual di luar pernikahan (Angold et al., 2012).

Anak melakukan perundungan terjadi akibat faktor lingkungan sekolah, keluarga, media, hubungan teman sebaya, dan kondisi sosial dan budaya (Lestari, 2021). Lingkungan sekolah yang tidak aman serta tanpa pengawasan menjadi pemicu siswa melakukan perundungan. Tidak jauh berbeda, kondisi keluarga yang tidak sehat dapat memicu depresi dan stres yang membuat anak melampiaskan perlakuan buruk yang dialami di rumah kepada orang lain. Usia remaja adalah usia pencarian jati diri dimana anak mudah terpengaruh dan meniru tindakan negatif yang ditampilkan di media. Begitupun hubungan dengan teman sebaya yang berperilaku tidak baik akan memberikan pengaruh negatif kepada anak (Fitriani & Hastuti, 2017). Faktor penyebab perundungan lainnya adalah kondisi sosial dan budaya yang buruk mempengaruhi anak berperilaku kasar hingga memicu terjadinya perundungan.

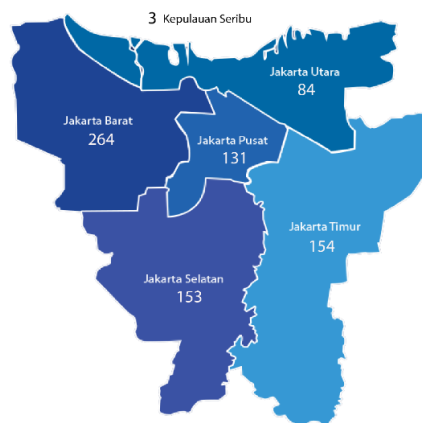
Salah satu provinsi yang memiliki angka kasus kekerasan tertinggi adalah DKI Jakarta. Data Simfoni KemenPPPA pada tahun 2022 memperlihatkan terdapat 796 laporan kasus kekerasan pada anak yang terjadi di DKI Jakarta (KemenPPPA, 2022).



Gambar 1 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak yang dilaporkan tahun 2021

Meskipun masih terdapat daerah yang memiliki angka kasus kekerasan tertinggi, tetapi rate korban kekerasan DKI Jakarta mencapai 2,7 yang berarti hampir 3 dari 10.000 anak di DKI Jakarta menjadi korban kekerasan. Rate korban ini jauh lebih tinggi dari provinsi dengan tingkat kekerasan tertinggi seperti Jawa Timur (1,5), Jawa Tengah (1,4), Jawa Barat (0,7), dan Sumatera Utara (2,2).

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena DKI Jakarta adalah provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia tahun 2022 yaitu sebesar 81,65 (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, 2022).



Gambar 2 Jumlah Korban Kekerasan pada Anak berdasarkan Wilayah di DKI Jakarta

Fenomena ini memperlihatkan bahwa tingginya tingkat pendidikan yang menjadi salah satu indikator dalam IPM, tidak memberikan jaminan tingginya pemahaman terhadap kekerasan ataupun perundungan, terbukti dengan masih maraknya kasus kekerasan dan perundungan yang terjadi di DKI Jakarta.

Salah satu upaya Kemendikbudristek dalam memerangi perundungan adalah dengan memperkuat regulasi yang dapat mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Permendikbudristek PPKSP memiliki peran penting dalam memenuhi amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah terkait Perlindungan Khusus Bagi Anak (Kemendikbudristek, 2023c). Salah satu yang menjadi fokus dalam regulasi ini adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang melibatkan semua warga satuan pendidikan dan pemerintah daerah (Kemendikbudristek, 2023a).

Upaya pencegahan perundungan dengan pelibatan aktif dari warga satuan pendidikan dilakukan melalui implementasi program berbasis sekolah yang seringkali efektif mengurangi perilaku perundungan sebesar 20-23%, dan menurunkan angka korban perundungan sebesar 17-20% (Menesini & Salmivalli, 2017). Salah satu program berbasis sekolah yang melibatkan peran aktif siswa adalah Program Roots.

Program Roots merupakan model intervensi anti perundungan berbiaya rendah yang berfokus pada upaya menciptakan iklim yang aman di sekolah dengan pelibatan aktif peran siswa sebagai agen perubahan (Bowes et al., 2019; UNICEF, 2017b). Program Roots lebih awal diimplementasikan pada 56 satuan pendidikan dengan 24.191 siswa di Amerika Serikat. Program ini memiliki kelebihan karena dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang terbatas, dan memanfaatkan jejaring sosial untuk memaksimalkan dampak dari implementasi program. Hasil dari implementasi Program Roots di Amerika memperlihatkan angka konflik antar siswa berkurang hingga 30% selama satu tahun (Paluck et al., 2016).

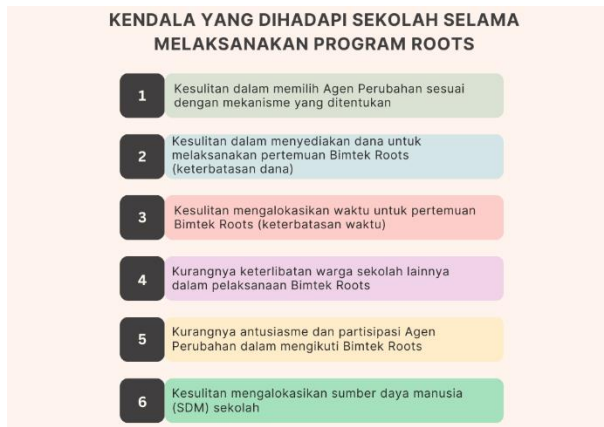
Program Roots hadir di Indonesia tahun 2016 dan diuji coba pada dua satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan dan 4 satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan 6.338 siswa. Pada tahun 2019 dilakukan uji coba tahap kedua di 12 satuan pendidikan di Papua Barat dengan melibatkan 3.101 siswa (Keysinaya & Nuraeni, 2022). Berdasarkan uji coba yang dilakukan di Sulawesi Selatan, terjadi penurunan perilaku perundungan hingga 29% (UNICEF, 2017a). Sementara di Jawa Tengah terjadi peningkatan jumlah laporan korban karena meningkatnya kesadaran warga satuan pendidikan terkait konsep perundungan (UNICEF, 2018a). Penurunan juga terjadi di Provinsi Papua Barat dimana angka perundungan menurun di kisaran 20-30%.

Keberhasilan Program Roots yang mampu menurunkan angka konflik antarsiswa sebesar 30% di Amerika Serikat, dan menurunkan perilaku perundungan sebesar 29% di Sulawesi Selatan, maka Kemendikbudristek berkolaborasi dengan UNICEF dan mitra mengimplementasikan Program Roots secara nasional pada lebih dari 1800 satuan pendidikan (Puspeka, 2021).

Tahap implementasi merupakan tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik (Wijayanti & Jannah, 2019). Walaupun kebijakan telah direncanakan dengan baik, tujuan dari kebijakan tidak akan tercapai jika tidak diimplementasikan dengan benar (Mubarok et al., 2020). Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan baik undang-undang, peraturan, dan keputusan, yang keberhasilannya dapat diukur dari proses implementasi (Ramadan et al., 2023). Aspek penting dalam proses implementasi adalah mengidentifikasi masalah dan peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Van Meter dan Van Horn melihat dalam implementasi kebijakan, terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan. Variabel tersebut antara lain antara lain 1) standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik organisasi

pelaksana, 4) komunikasi antarorganisasi pelaksana, 5) sikap para pelaksana, dan 6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Sejak Program Roots diimplementasikan di DKI Jakarta tahun 2021 hingga saat ini, beberapa satuan pendidikan masih menghadapi kendala dalam mengimplementasikan program. Dalam survei awal yang digunakan untuk memetakan implementasi Program Roots, tercatat dari 28 satuan pendidikan yang mengisi survei, hanya 6 satuan pendidikan yang melaksanakan kembali Program Roots di tahun 2022.



Gambar 3 Daftar Kendala yang dihadapi sekolah selama melaksanakan Roots

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi Program Roots yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan di DKI Jakarta dengan menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Melalui model implementasi ini, akan digali kendala yang dihadapi selama proses implementasi secara lebih dalam agar selanjutnya dapat dirumuskan strategi implementasi Program Roots untuk memaksimalkan implementasi Program Roots di DKI Jakarta.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, dalam hal ini adalah proses implementasi Program Roots di DKI Jakarta. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui angket/kuisisioner dan wawancara terhadap informan. Sementara data sekundernya yang digunakan diperoleh dari studi dokumentasi.

Angket/kuisisioner digunakan untuk identifikasi awal implementasi Program Roots di satuan pendidikan. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada satuan pendidikan yang melaksanakan kembali Program Roots berdasarkan data hasil kuisisioner. Wawancara dilakukan agar dapat menggali informasi yang diharapkan, dan mendapatkan data dengan minimum bias dan maksimum efisiensi (Hakim, 2013).

Wawancara dilakukan kepada informan penelitian yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang relevan terhadap tema penelitian (Sidiq & Choiri, 2019). Informan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Ketua Tim Anti Perundungan, Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek sebagai informan yang memahami dan terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan Program Roots Kemendikbudristek.
- 2) Perwakilan UNICEF untuk Implementasi Program Roots Indonesia yang mengetahui proses implementasi sejak program ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Selain itu UNICEF juga bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan ajar serta melatih fasilitator nasional.
- 3) Dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang berperan penting dalam mendukung implementasi Program Roots di DKI Jakarta.
- 4) Enam satuan pendidikan yang melaksanakan kembali Program Roots tahun 2022, meliputi unsur Kepala Sekolah, Fasilitator Guru, Siswa Agen Perubahan, dan siswa non agen perubahan yang merasakan dampak Program Roots.

Teknik pengumpulan data lainnya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Studi dokumentasi pada penelitian ini dilakukan pada dokumen kebijakan, laporan, buku, paparan kebijakan, dokumen perencanaan, dan lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yaitu meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Fauziyah & Arif, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Implementasi Program Roots di DKI Jakarta

Penelitian mengambil lokus pada satuan pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mengetahui secara lebih dalam bagaimana implementasi Program Roots serta hambatan apa yang ditemui selama pelaksanaan program.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak, pelajar menduduki peringkat kedua jumlah korban kekerasan tertinggi di DKI Jakarta berdasarkan pekerjaan. Menurut model implementasi Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan publik berjalan secara linear antara kebijakan, pelaksana, dan kinerja dari pelaksana kebijakan publik. Berikut gambaran implementasi Program Roots berdasarkan indikator implementasi kebijakan Van Meter Van Horn:

Standar dan tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan mempunyai indikator kinerja sejauh mana standar dan tujuan kebijakan tercapai dilihat melalui dokumen seperti peraturan dan pedoman program (Rolifola CH & Fitriyani K, 2023).

Standar dan tujuan Program Roots telah tertuang dalam Renstra Kemendikbudristek dimana salah satu indikator kinerja program untuk meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter adalah persentase provinsi dan kabupaten/kota mengimplementasikan materi penuntasan perundungan (Kemendikbudristek, 2022).

Pada level pemerintah daerah, upaya pencegahan dan penanganan perundungan telah tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 tahun 2018 tentang Kegiatan Strategis Daerah dan juga tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melihat bahwa pemerintah

daerah telah memiliki standar untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, sudah seharusnya upaya ini juga tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan DKI Jakarta, tetapi pada Renstra tahun 2017 s.d. 2022 belum tertuang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rencana program/kegiatan dinas pendidikan.

Pada level satuan pendidikan, satuan pendidikan telah menindaklanjuti indikator keberhasilan dari Program Roots, serta telah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan di satuan pendidikan.

Tabel 1 Tindak lanjut satuan pendidikan berdasarkan indikator keberhasilan Program Roots

Sekolah	Mengikuti Bimtek Roots	Keterlibatan warga sekolah	Fasilitator guru yang terlatih	Pertemuan Roots 10 modul	Terbentuk Agen Perubahan	Perubahan pemahaman
Sekolah A	Ya	Ya	Ya	10	Ya	Ya
Sekolah B	Ya	Ya	Ya	15	Ya	Ya
Sekolah C	Ya	Ya	Ya	15	Ya	Ya
Sekolah D	Ya	Ya	Ya	15	Ya	Ya
Sekolah E	Ya	Ya	Ya	10	Ya	Ya
Sekolah F	Ya	Ya	Ya	15	Ya	Ya

Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan program bergantung pada pengetahuan atau keterampilan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (bt Sani & Idris, 2018). Sumber daya disini dapat berupa sumber daya finansial, maupun sumber daya manusia.

Selama implementasi Program Roots tahun 2021, satuan pendidikan mendapatkan dana bantuan pemerintah, sementara untuk tahun 2022 satuan pendidikan diharapkan dalam mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Program Roots melalui dana BOS, ataupun sumber pendanaan lainnya. Hal ini berdampak pada jumlah sekolah yang melanjutkan Program Roots di tahun 2022 menurun drastis. Berdasarkan hasil survei, 50% satuan pendidikan menyatakan kendala sekolah tidak melaksanakan Program Roots kembali adalah karena terkendala biaya.

Satuan pendidikan yang melaksanakan kembali Program Roots di tahun 2022 tidak mengalami kendala dalam pendanaan karena menggunakan sumber pendanaan lainnya yaitu dari BOS, sementara sumber pendanaan untuk sekolah swasta dapat melalui dana swadaya ataupun yayasan. Bahkan dalam implementasi Program Roots, terdapat satuan pendidikan yang tidak menggunakan dana namun tetap melaksanakan Program Roots dengan mengurangi beberapa aktivitas. Sekolah memanfaatkan hasil karya dan bahan-bahan tahun lalu yang masih dapat digunakan kembali.

Tabel 2 Sumber pendanaan Program Roots pada satuan pendidikan

Satuan Pendidikan	Status	Pendanaan	
		2021	2022
Sekolah A	Negeri	Banpem	BOS
Sekolah B	Swasta	Banpem	Sekolah, Yayasan
Sekolah C	Swasta	Banpem	Banpem
Sekolah D	Swasta	Banpem	Swadaya, Yayasan
Sekolah E	Swasta	Banpem	Banpem
Sekolah F	Negeri	Banpem	Banpem

Selain dukungan anggaran, sumber daya manusia memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi Program Roots. Guru yang terpilih sebagai fasilitator dalam Program Roots telah memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

Tabel 3 Kriteria Fasilitator Guru sesuai dengan pedoman teknis

Kriteria	Sekolah A	Sekolah B	Sekolah C	Sekolah D	Sekolah E	Sekolah F
Memiliki jabatan di sekolah	√	√	√	√	√	√
Berusia 25 s.d. 45	√	√	√	√	√	√
Bersahabat	√	√	√	√	√	√
Pengalaman pembina kegiatan	√	√	√	√	√	√
Menguasai bahasa indonesia yang baik	√	√	√	√	√	√
Mampu berdiskusi dengan baik	√	√	√	√	√	√
Mampu mengatur waktu	√	√	√	√	√	√
Menguasai program roots	√	√	√	√	√	√

Komunikasi Antarorganisasi Pelaksana

Komunikasi antarorganisasi pelaksana menitikberatkan pada ketepatan dan konsistensi komunikasi dan pemahaman para pelaksana terkait tujuan program (Rolifola CH & Fitriyani K, 2023).

Komunikasi antar pelaksana dalam proses implementasi Program Roots sudah cukup baik, mulai dari UNICEF kepada Puspeka, kemudian antara Puspeka kepada pemerintah daerah, dan juga pada satuan pendidikan. Para pelaksana telah mendapatkan informasi yang sama karena baik pemda, dan satuan pendidikan telah mendapatkan sosialisasi terkait Program Roots dengan tujuan memberikan pemahaman sebelum program tersebut diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dinas pendidikan mengharapkan kolaborasi yang semakin aktif antara Puspeka sebagai penyelenggara program dengan dinas pendidikan karena walaupun telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat beberapa potensi kolaborasi yang belum terfasilitasi dengan baik. Masih terdapat beberapa program pencegahan dan penanganan kekerasan atau perundungan yang juga dilaksanakan oleh satuan pendidikan selain Program Roots. Program tersebut merupakan inisiasi dari pemerintah daerah yaitu Program Laboratorium Pancasila, dan juga inisiasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga terdapat satuan pendidikan yang melaksanakan 2-3 program dengan tujuan yang sama.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan kesesuaian agen pelaksananya yang dapat tergambar pada bagaimana prosedur operasional standar yang tertuang dalam kebijakan dan karakteristik organisasi (Tuti et al., 2020). SOP merupakan panduan yang memastikan pekerjaan dan aktivitas operasional organisasi dapat berjalan dengan baik (Sailendra & Annie,

2015). SOP dalam implementasi Program Roots tertuang dalam petunjuk pelaksanaan Program yang diterbitkan oleh Puspeka.



Gambar 4 Petunjuk pelaksanaan Program Roots Indonesia

Sementara untuk pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki SOP yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan pendidikan yang telah mengatur mekanisme pencegahan dan kekerasan, serta keterlibatan dari ekosistem pendidikan.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain pemahaman pelaksana terhadap suatu kebijakan, penerimaan atau penolakan pelaksana terhadap program, dan intensitas respon pelaksana (Olin et al., 2021).

Dalam implementasi Program Roots, semua pelaksana kebijakan telah mendapatkan informasi dan pemahaman yang sama terkait tujuan dan mekanisme pelaksanaan Program Roots. Pemerintah daerah pun menunjukkan dukungan yang positif terhadap implementasi program ini mengingat pencegahan dan penanganan perundungan merupakan salah satu program prioritas dan tertuang dalam dokumen perencanaan Provinsi DKI Jakarta. Namun hal yang perlu ditingkatkan adalah keterlibatan dari pemangku kepentingan lain yang seharusnya dapat berkontribusi besar dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan, tetapi belum sepenuhnya aktif dalam implementasi Program Roots.

Sikap penerimaan juga belum sepenuhnya tercermin pada level satuan pendidikan. Beberapa satuan pendidikan nampak belum berkomitmen dalam mengimplementasikan Program Roots sebagai salah satu upaya pencegahan perundungan karena satuan pendidikan memilih tidak melaksanakan kembali Program Roots ketika tidak lagi mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah.



Gambar 5 Alasan Sekolah tidak melaksanakan Program Roots kembali di tahun 2022

Sikap penerimaan tidak hanya ditunjukkan oleh warga satuan pendidikan, tetapi juga oleh komite dan orang tua. Dukungan dan penerimaan dari warga sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting karena program ini akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Van Meter dan Van Horn memiliki pandangan bahwa lingkungan eksternal memiliki pengaruh penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pada aspek lingkungan ekonomi, kondisi ekonomi yang tidak kondusif sangat mempengaruhi implementasi Program Roots, seperti ketidakmampuan sekolah dalam membiayai operasional program, hingga pandemi covid-19 yang tidak hanya membuat anggaran Dinas Pendidikan dialihkan pada bidang kesehatan, juga meningkatkan risiko terjadinya perundungan secara daring karena penggunaan gawai yang cukup intens oleh peserta didik (Bagja, 2021).

Anggapan sosial lain yang turut mempengaruhi implementasi Program Roots adalah pandangan sosial bahwa beberapa tindakan perundungan adalah hal yang lazim dalam pertemanan karena merupakan bentuk candaan untuk mendekati diri. Hal ini diungkapkan pula oleh fasilitator guru yang beranggapan beberapa aduan siswa terkesan berlebihan setelah mendapatkan sosialisasi Program Roots.

Kondisi politik juga sangat mempengaruhi implementasi Program Roots menjadi sangat dinamis karena keberlanjutan program ini sangat dipengaruhi oleh kondisi politik atau keberpihakan para pembuat kebijakan terhadap suatu isu.

Strategi Implementasi Program Roots di DKI Jakarta

Berdasarkan hasil analisis implementasi Program Roots di DKI Jakarta, dapat diidentifikasi beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam proses implementasi sehingga diperlukan strategi dalam upaya memaksimalkan hasil implementasi Program Roots di DKI Jakarta antara lain sebagai berikut.

Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan

Rencana strategis merupakan acuan dalam mengimplementasikan suatu program atau kegiatan. Perencanaan Strategis yang matang membuat suatu program dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Maria & Hadiyanto, 2021). Agar Dinas Pendidikan dapat melakukan intervensi dan penguatan terhadap implementasi Program Roots, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Dinas Pendidikan. Dengan ini diharapkan Program Roots memiliki landasan yang kuat sejak tahap perencanaan sehingga dapat menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rencana kerja sekolah.

Sosialisasi Fleksibilitas Penggunaan Dana BOS untuk Program Roots

Salah satu hambatan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Program Roots adalah keterbatasan dana yang dimiliki untuk menjalankan program ini. Untuk mengatasi hal tersebut Kemendikbudristek telah memberikan fleksibilitas penggunaan dana BOS sehingga dapat digunakan untuk membiayai program pencegahan dan penanganan kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan seperti yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Dinas pendidikan dapat memberikan kebijakan sekolah untuk mengusulkan pergeseran atau perubahan RKAS jika ingin mengalokasikan dana untuk program pencegahan dan penanganan kekerasan ini. Permasalahan selanjutnya yang

dihadapi adalah informasi ini belum diketahui sepenuhnya oleh satuan pendidikan, sehingga perlu dilakukan sosialisasi oleh dinas pendidikan karena kewenangan pengesahan usulan perubahan RKAS sekolah ada pada dinas pendidikan. Untuk mendukung agar informasi ini dapat tersampaikan secara masif, sosialisasi ini dapat dilakukan dengan beragam media, seperti sosial media, surat dinas resmi, buku panduan ARKAS, serta dicantumkan dalam menu tutorial di aplikasi RKAS.

Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dan Learning Management System untuk Pelatihan Fasilitator Guru

Keberhasilan implementasi Program Roots sangat bergantung pada Fasilitator Guru yang sebelumnya telah mendapat pelatihan dari Puspeka untuk memfasilitasi pelaksanaan program Roots di satuan pendidikan termasuk melatih para agen perubahan. Namun kendala yang dihadapi adalah pelatihan fasilitator guru hanya dilakukan satu kali kepada satuan pendidikan. Sehingga ketika terjadi pergantian fasilitator guru, atau regenerasi, fasilitator guru yang baru tidak mendapatkan ilmu yang didapat saat pelatihan dengan lengkap.

Untuk memudahkan guru mendapatkan pelatihan bagaimana menyampaikan Program Roots kepada satuan pendidikan, dapat dilakukan melalui aplikasi baik itu Platform Merdeka Mengajar atau *Learning Management System*. Platform Merdeka Mengajar (PMM) merupakan platform teknologi yang disediakan untuk mempermudah guru mengajar dan belajar, menyediakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi, dan dapat diakses dimana saja menggunakan gawai. Tutorial cara menyampaikan Program Roots dapat disampaikan dalam bentuk tulisan atau video ajar yang bisa diakses dalam LMS atau PMM. Dengan ini diharapkan kendala keterbatasan SDM yang memahami Program Roots dapat teratasi.

Penanaman Budaya Anti Kekerasan oleh Orang Tua

Salah satu hal penting yang mendukung implementasi Program Roots dan pencegahan perundungan adalah menciptakan lingkungan sosial yang sehat antara anak dengan orang tua (Borualogo et al., 2022). Keterlibatan orang tua sangat diperlukan agar anak dapat terbuka, dan orang tua bisa memberikan contoh teladan bagi anak untuk bersikap dalam lingkungan pergaulan.

Beberapa hal penting yang dapat diajarkan orang tua untuk menanamkan budaya anti kekerasan antara lain:

- 1) Menjadi teladan bagi anak baik di sekolah maupun di rumah.
- 2) Menunjukkan kehangatan dan perhatian kepada anak
- 3) Menetapkan batasan tegas mengenai perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh anak
- 4) Konsisten menggunakan tindakan nonfisik saat mendidik atau menasehati anak
- 5) Mengajarkan disiplin positif, yaitu penerapan disiplin tanpa hukuman dan pemberian hadiah.

Pelibatan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan

Program pencegahan dan penanganan kekerasan tidak dapat dilakukan hanya oleh satuan pendidikan tetapi perlu sinergi antara para pemangku kepentingan. Salah satu amanat dalam Permendikbudristek 46/2023 adalah satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk

memastikan adanya respon cepat ketika terjadi kekerasan di satuan pendidikan. Tercatat per Desember 2023 sudah terbentuk 56,14% TPPK di DKI Jakarta. Walaupun Satgas DKI Jakarta belum terbentuk, tetapi Jakarta telah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bagi peserta didik yang diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 826/2020.

Salah satu strategi untuk memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan berjalan secara optimal adalah melalui pelibatan instansi dan organisasi yang bergerak pada perlindungan anak untuk bergabung dalam satuan tugas atau terlibat secara aktif dalam pemenuhan layanan kasus kekerasan.

Tabel 4 Pemetaan Sumber Dukungan Layanan Kasus Kekerasan

Sumber dukungan	Instansi/Lembaga Dukungan	Peranan/Layanan yang diberikan
Rumah Aman bagi anak korban kekerasan	Rumah aman rujukan dari P2TP2A	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pelayanan perlindungan bagi anak korban kekerasan Mengintegrasikan pelayanan perlindungan Mempermudah koordinasi pelayanan perlindungan (Pergub 48/2018)
Jaminan Kesehatan dan pelayanan korban kekerasan anak	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Korban kekerasan perempuan dan anak mendapatkan pelayanan penuh secara gratis (Pergub DKI 169/2022)
Pemeriksaan fisik	Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia (untuk warga DKI Jakarta dan WNI yang mengalami tindak kekerasan di wilayah DKI Jakarta)	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan fisik dan/atau visum anak korban kekerasan (Pergub 30/2021) Perlindungan keselamatan dan pelayanan bagi semua orang termasuk anak-anak (Permenkes 43/19)
Psikososial dan pendamping sosial	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan rehabilitasi sosial anak korban tindak kekerasan Pendampingan korban tindak kekerasan (Renstra Dinas Sosial DKI Jakarta 2023-2026)
Bantuan hukum	LBH, LBH Apik	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan hukum untuk korban dan pelaku kekerasan
Kesehatan mental dan pemeriksaan psikologis	<ul style="list-style-type: none"> Puskesmas, Sahabat Jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan kesehatan mental psikolog atau psikiater (https://sahabatjiwa.dinkes.jakarta.go.id/)
Edukasi kesehatan mental	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Pulih Yayasan Iam Okay SEJIWA 	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi terkait pentingnya kesehatan mental Pemulihan trauma dan penguatan psikososial bagi penanganan kekerasan pada kelompok rentan
Unit layanan disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Unit layanan disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah

Sumber dukungan	Instansi/Lembaga Dukungan	Peranan/Layanan yang diberikan
		<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat anak penyandang disabilitas korban kekerasan • Memberikan perlindungan khusus terhadap anak penyandang disabilitas • Menyediakan aman (Perda Provinsi DKI Jakarta 4/2022)
Keberlanjutan pendidikan	• Dinas Pendidikan	• Memastikan keberlanjutan pendidikan bagi korban dan pelaku perundungan
Sosialisasi upaya pencegahan dan penanganan perundungan di satuan pendidik	• Dinas Pendidikan	• Menyosialisasikan kebijakan, program, materi, dan informasi terkait pencegahan dan penanganan perundungan
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi pelaku anak	• Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) DKI Jakarta	• Memberikan pelayanan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial pada pelaku anak yang berhadapan dengan hukum (UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
Advokasi, penanganan dan pendampingan kasus anak korban kekerasan termasuk perundungan	• Lembaga Perlindungan Anak Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pengaduan dan pendampingan bagi anak yang mengalami kekerasan dan kehilangan haknya. • Mengupayakan rehabilitasi arau pengembalian kondisi anak yang mengalami kekerasan
Layanan perlindungan anak korban kekerasan berbasis gender	• UPT PPA DKI Jakarta (P2TP2A)	• Pelayanan kepada korban kekerasan terhadap anak
Melaksanakan perlindungan anak baik upaya pencegahan dan penanganan kekerasan	• Dinas PPAPP DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perlindungan anak • Menginisiasi program dan kegiatan terkait perlindungan anak
Mencegah tindak kriminal	• Aparat keamanan	• Melakukan langkah preventif mencegah tindak kriminal anak dan remaja

Gerakan Berani Laporkan Tolak Kekerasan

Salah satu hambatan dalam penanganan perundungan adalah banyaknya kasus perundungan yang tidak dilaporkan, baik kepada orang tua, guru, maupun pihak berwajib. Korban perundungan seringkali enggan untuk melaporkan kekerasan atau perundungan yang dialami karena malu dan tidak ditanggapi (Kamila et al., 2022).

Selain korban yang enggan untuk melapor, peran bystander juga perlu dilibatkan dalam pengawasan kasus perundungan di sekolah. Bystander yang semula bersikap pasif ketika terjadi perundungan diharapkan dapat aktif bertindak membela korban. Dalam banyak kasus, perundungan berkembang menjadi fenomena kelompok dimana dukungan dari saksi atau bystander ini menjadi sangat penting karena peran bystander seolah memberikan penguatan diterimanya perilaku perundungan oleh teman sebaya. Sehingga sangat penting untuk menanamkan nilai moral dan empati agar bystander menunjukkan sikap keberpihakan kepada korban.

Selain perubahan paradigma pada korban dan saksi atau bystander, perlu difasilitasi kanal pelaporan yang mudah digunakan oleh anak untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka lihat atau mereka alami. Kanal pelaporan dapat disediakan dalam bentuk *online* seperti *hotline* atau melalui aplikasi formulir *online*. Selain itu juga perlu disediakan kanal pelaporan *offline* bisa melalui kotak

pengaduan yang dipasang di tempat-tempat strategis dan rawan perundungan, dapat juga melalui layanan bimbingan konseling di sekolah.

Strategi ini diharapkan mampu membantu proses pengawasan yang dilakukan satuan pendidikan, sehingga dapat dilaporkan secara berkala kepada dinas pendidikan untuk ditindaklanjuti jika kasus perundungan tidak mampu diselesaikan di tingkat satuan pendidikan.

Mengadakan Kelas Empati (*Empathy Classes*) untuk meningkatkan kepedulian siswa

Perundungan memiliki banyak dampak psikologis yang sangat mempengaruhi kesehatan mental anak. Berdasarkan penelitian, rasa empati dapat berfungsi sebagai mekanisme koping (*coping mechanism*) yang efektif dalam menangani krisis mental (Sun et al., 2019). Mekanisme koping yang baik akan membawa seseorang mampu menangani perasaan stres, kecemasan, dan depresi (Septyari et al., 2022).

Selain berfungsi sebagai mekanisme koping, empati juga merupakan respon afektif yang dihasilkan dari memahami keadaan emosi orang lain (Lee et al., 2021). Empati dianggap sebagai perlindungan umum yang efektif melawan perundungan (Graf et al., 2019).

Pentingnya penanaman rasa empati pada anak dapat dibentuk dengan mengadakan kelas empati dimana anak belajar untuk mendengarkan dan mengerti perasaan orang lain. Kelas empati telah diterapkan di Denmark, Finlandia, dan Rumania dan mampu mencegah perundungan pada anak-anak (Palade & Pascal, 2023).

Dalam kelas empati, anak dapat diajarkan kesadaran akan sikap empati dan sensitivitas emosional, kemampuan mendengarkan dan merespon dengan empati, perbedaan sudut pandang, dan aktivitas-aktivitas yang dapat menanamkan rasa empati dalam diri anak.

Membangun Suasana Kelas yang Positif dan Inklusif

Salah satu upaya Denmark dalam upaya pencegahan perundungan adalah dengan menciptakan budaya sekolah yang positif dan inklusif dengan mempromosikan nilai-nilai keadilan, gotong royong, kepedulian, toleransi, dan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila.



Gambar 6 Nilai/Dimensi dalam Profil Pelajar Pancasila

Membangun suasana kelas yang positif dan inklusif dapat dilakukan dengan beragam aktivitas menarik antara lain mengorganisir proyek kolaboratif dalam

rangka mengkampanyekan anti perundungan, mengadakan pameran karya seni yang berkaitan dengan upaya pencegahan perundungan, atau ragam aktivitas lainnya yang dapat memfasilitasi kreativitas siswa, dan membangun rasa kepedulian yang tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi Program Roots di DKI Jakarta belum sepenuhnya optimal dilihat dari indikator berdasarkan indikator standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses implementasi sehingga diperlukan strategi untuk mengoptimalkan implementasi Program Roots, antara lain:

1. Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan
2. Sosialisasi Fleksibilitas Penggunaan Dana BOS untuk Program Roots
3. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dan Learning Management System untuk Pelatihan Fasilitator Guru
4. Penanaman Budaya Anti Kekerasan oleh Orang Tua
5. Pelibatan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan
6. Gerakan Berani Laporkan Tolak Kekerasan
7. Mengadakan Kelas Empati (*Empathy Classes*) untuk meningkatkan kepedulian siswa
8. Membangun Suasana Kelas yang Positif dan Inklusif

Melalui strategi ini diharapkan dapat memaksimalkan implementasi Program Roots agar tercipta ekosistem pendidikan yang aman dan bebas perundungan.

Saran

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan. Perlu dilakukan advokasi kebijakan agar strategi ini tersampaikan kepada para pemangku kepentingan sehingga proses implementasi Program Roots di DKI Jakarta dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Melihat Program Roots merupakan program yang terus berkembang, penting untuk melakukan inovasi terus menerus agar program ini dapat memberikan hasil yang lebih efektif.

Menjelang pemilihan umum, dinamika politik dapat berdampak pada keberlanjutan program. Perlu dukungan dari semua pihak, khususnya masyarakat umum untuk terus bergerak menyuarakan keberlanjutan Program Roots hingga masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Angold, A., Erkanli, A., Copeland, W., Goodman, R., Fisher, P., & Costello, E. (2012). Psychiatric Diagnostic Interviews for Children and Adolescents: A Comparative Study. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 51, 506–517. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2012.02.020>

Bagja, K. (2021, July 14). Anggaran Rp2,54 Triliun di Pemprov DKI Dialihkan untuk Tangani Covid-19.

<https://www.idxchannel.com/economics/anggaran-rp254-triliun-di-pemprov-dki-dialihkan-untuk-tangani-covid-19>.

Berger, K. S. (2007). Update on bullying at school: Science forgotten? *Developmental Review*, 27(1), 90–126. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2006.08.002>

Borualogo, I. S., Kusdiyati, S., & Wahyudi, H. (2022). Pelajaran Yang Didapat Dari Olweus Bullying Prevention Program dan KiVa: Review Naratif. *Buletin Psikologi*, 30(1), 1. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.64929>

Bowes, L., Aryani, F., Ohan, F., Haryanti, R. H., Winarna, S., Arsianto, Y., Budiawati, H., Widowati, E., Saraswati, R., Kristianto, Y., Suryani, Y. E., Ulum, D. F., & Minnick, E. (2019). The development and pilot testing of an adolescent bullying intervention in Indonesia – the ROOTS Indonesia program. *Global Health Action*, 12(1), 1656905. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1656905>

bt Sani, N., & Idris, A. R. (2018). Implementation of Linus programme based on the model of Van Meter and Van Horn. *MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences*, 1(2), 25–36.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta. (2022). Data Statistik Sektor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktorat Sekolah Dasar. (2021, September 29). Sekolah Aman, Nyaman, dan Menyenangkan tanpa Perundungan. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/sekolah-aman-nyaman-dan-menyenangkan-tanpa-perundungan>.

Fauziah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>

Fitriani, W., & Hastuti, D. (2017). Pengaruh Kelekatan Remaja Dengan Ibu, Ayah, dan Teman Sebaya Terhadap Kenakalan Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 9(3), 206–217. <https://doi.org/10.24156/jikk.2016.9.3.206>

Graf, D., Yanagida, T., & Spiel, C. (2019). Through the magnifying glass: Empathy's differential role in preventing and promoting traditional and cyberbullying. *Computers in Human Behavior*, 96, 186–195. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.02.007>

Greeff, P., & Grobler, A. A. (2008). Bullying During the Intermediate School Phase. *Childhood*, 15(1), 127–144. <https://doi.org/10.1177/0907568207086840>

Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Jurnal Aspirasi*, 4(2), 165–172.

Kamila, Y. N., Laksono, B. A., & Karwati, L. (2022). Peningkatan Kepekaan Pada Korban Bullying Di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Modern*, 7(3), 123–127. <https://doi.org/10.37471/jpm.v7i3.468>

Karatas, H., & Ozturk, C. (2011). Relationship Between Bullying and Health Problems in Primary School Children. *Asian Nursing Research*, 5(2), 81–87. [https://doi.org/10.1016/S1976-1317\(11\)60016-9](https://doi.org/10.1016/S1976-1317(11)60016-9)

Kemendikbudristek. (2022). Permendikbudristek Nomot 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024. Kemendikbudristek.

- Kemendikbudristek. (2023a). Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kemendikbudristek. (2023b). Urgensi PPSKP. <https://Merdekadarikekerasan.Kemdikbud.Go.Id/Urgensi-Ppksp/>.
- Kemendikbudristek. (2023c, August). Merdeka Belajar: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. https://Merdekabelajar.Kemdikbud.Go.Id/Episode_25/Web.
- KemenPPA. (2023). SIMFONI-PPA. <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan>.
- KemenPPA. (2022). Simfoni-PPA. <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan>.
- Keysinaya, E. Y., & Nuraeni. (2022). Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah Melalui Program Roots. *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 207–224. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22258>
- Lee, J., Cheung, H. S., Chee, G., & Chai, V. E. (2021). The Moderating Roles of Empathy and Attachment on the Association Between Latent Class Typologies of Bullying Involvement and Depressive and Anxiety Symptoms in Singapore. *School Mental Health*, 13(3), 518–534. <https://doi.org/10.1007/s12310-021-09411-3>
- Lestari, W. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 3(2), 147–157. <https://doi.org/10.15408/sd.v3i2.4385>
- Maria, R., & Hadiyanto, H. (2021). Urgensi Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Pengembangan dan Mutu Pendidikan. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(5), 2012–2024. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.742>
- Menesini, E., & Salmivalli, C. (2017). Bullying in schools: the state of knowledge and effective interventions. *Psychology, Health & Medicine*, 22(sup1), 240–253. <https://doi.org/10.1080/13548506.2017.1279740>
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- OECD. (2019). Result From PISA 2018.
- Olin, Y. K., Kase, P., & Toda, H. (2021). The role of traditional institutions in implementing the empowerment policy of Oetulu village, Musi district, Timor Tengah Utara regency. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 1(2), 145–161. <https://doi.org/10.35912/jgas.v1i2.305>
- Palade, T., & Pascal, E. (2023). Reducing Bullying through Empathy Training: The Effect of Teacher's Passive Presence. *Behavioral Sciences*, 13(3), 216. <https://doi.org/10.3390/bs13030216>
- Paluck, E. L., Shepherd, H., & Aronow, P. M. (2016). Changing climates of conflict: A social network experiment in 56 schools. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(3), 566–571. <https://doi.org/10.1073/pnas.1514483113>
- Puspeka. (2021). Bersama, Kita Hentikan Perundungan! <https://Cerdasberkarakter.Kemdikbud.Go.Id/Merdekadariperundungan/>.

Ramadan, F., Wardhani, A. C., & Malta, M. (2023). Implementation Of Public Service Policies At The Department Of Investment And Integrated One Door Service at Pringsewu Regency. *Adები International Journal of Multidisciplinary Sciences*, 2(2), 173–188. <https://doi.org/10.54099/aijms.v2i2.471>

Rivers, I., & Smith, P. K. (1994). Types of bullying behaviour and their correlates. *Aggressive Behavior*, 20(5), 359–368. [https://doi.org/10.1002/1098-2337\(1994\)20:5<359::AID-AB2480200503>3.0.CO;2-J](https://doi.org/10.1002/1098-2337(1994)20:5<359::AID-AB2480200503>3.0.CO;2-J)

Rolifola CH, & Fitriyani K. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHES)*, 2(4). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.373>

Sailendra, & Annie. (2015). *Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP (Standard Operating Procedures)*. Trans Idea Publishing.

Septyari, N. M., Adiputra, I. M. S., & Devhy, N. L. P. (2022). Tingkat Stres dan Mekanisme Koping Mahasiswa dalam Penyusunan Skripsi pada Masa Pandemi. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 11(1), 14. <https://doi.org/10.36565/jab.v11i1.403>

Sidiq, U., & Choiri, Moh. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan (A. Mujahidin, Ed.)*. CV Nata Karya.

Sun, R., Vuillier, L., Hui, B. P. H., & Kogan, A. (2019). Caring helps: Trait empathy is related to better coping strategies and differs in the poor versus the rich. *PLOS ONE*, 14(3), e0213142. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213142>

Takizawa, R., Maughan, B., & Arseneault, L. (2014). Adult Health Outcomes of Childhood Bullying Victimization: Evidence From a Five-Decade Longitudinal British Birth Cohort. *American Journal of Psychiatry*, 777–784.

Tuti, R. W., Murod, M., El Adawiyah, S., & Patrianti, T. (2020). An Analysis of the Implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Special Capital Region of Jakarta. *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.136>

UNICEF. (2017a). *Bullying In Indonesia: Key Facts, Solutions, and Recommendations*.

UNICEF. (2017b). *Pencegahan Perundungan (Bullying) di SMP, SMA, dan SMK Panduan untuk Fasilitator*. UNICEF.

UNICEF. (2018a). *Evaluation Of The Roots Indonesia Peer Violence and Bullying Prevention Pilot South Sulawesi and Central Java*.

UNICEF. (2018b, June). *Bullying: a global challenge requires a global measure*. <https://www.unicef-irc.org/article/1867-bullying-a-global-challenge-requires-a-global-measure.html>.

UNICEF. (2021, June 1). *World Health Assembly Resolution Urges For Accelerated Action Towards Ending Violence Against Children*. <https://www.end-violence.org/articles/world-health-assembly-resolution-urges-accelerated-action-towards-ending-violence-against>.

Wijayanti, P., & Jannah, L. M. (2019). *Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*.

Wolke, D., Copeland, W. E., Angold, A., & Costello, E. J. (2013). Impact of Bullying in Childhood on Adult Health, Wealth, Crime and Social Outcomes. <https://doi.org/10.1177/0956797613481608>